



UKI PRESS
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**SEMINAR NASIONAL &
CALL FOR PAPERS**
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018
Auditorium Griha William Soeryadjaya
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

PROSIDING

“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

Susunan Panitia

Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA
(Rektor UKI)
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA
Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)

Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K
Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya

Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.
Dr. Demsi Jura, M.Th.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsy Jura, M.Th.

PROSIDING

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN
BERDASARKAN PANCASILA”**

Reviewer:

Dr. Demsey Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor:

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsey Jura, M.Th.

ISBN: 978-979-8148-96-5

Penerbit
UKI Press
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp.(021)8092425, ukipress@uki.ac.id
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Keynote Speakers		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
Speakers		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
Pemakalah		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiory (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksin (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa

Aartje Tehupeiory

Universitas Kristen Indonesia
aartjeteheupeiory@gmail.com

Abstrak

Menurut Keputusan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa ada 2 jenis tantangan yaitu secara internal salah satunya kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan. Sedangkan secara eksternal makin kuatnya intensitas kekuatan global dalam rumusan kebijakan nasional. Era reformasi yang terjadi adanya gerakan dePancasila – Isasi. Dengan ditandai MPR mencabut ketentuan MPR Nomor 11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Panca karsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara sebagai mana dinyatakan dalam Keputusan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 salah satu alasannya pencabutan Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1978 sebab materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara sementara dalam Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 menegaskan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bersejarah. Oleh karena itu bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Salah satunya dengan Revitalisasi yang tercermin pada nilai-nilai yang terpatut di dalam Pancasila melalui agama dan budaya ini dapat dilakukan peningkatan pendidikan karakter melalui Revitalisasi kegiatan-kegiatan dalam kemajemukan struktur masyarakat yang unik dengan cara menghargai umat beragama dan harus saling menghormati, inilah cara merawat kemajemukan berdasarkan Pancasila dengan saling berbagi informasi tentang adat agamanya masing-masing yang merupakan tentang keanekaragaman adat dan agama Indonesia.

Kata kunci: Lintas Agama, Budaya menjaga Kemajemukan

I. Pendahuluan

Dengan merujuk pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa ada 2 jenis tantangan yaitu secara internal salah satunya kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan. Sedangkan secara eksternal makin kuatnya intensitas kekuatan global dalam rumusan kebijakan nasional. Era reformasi yang terjadi adanya gerakan dePancasila – Isasi. Dengan ditandai MPR mencabut ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Panca Karsa*). Dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara sebagai mana dinyatakan dalam Keputusan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 salah satu alasannya pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 sebab materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara sementara dalam Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 menegaskan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa. Upaya Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan karakter Bangsa yaitu etika Nasional yang dirumuskan dalam Pancasila.

Pada era reformasi konsekuensi dan keterbukaan yang berlebihan membuat segala hal yang berbau lama termasuk Pancasila di pinggirkan. Pancasila menjadi kesekian untuk pembangunan bangsa. Padahal, Pancasila adalah dasar dan pedoman bangsa ini dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu Pancasila sebagai bahasa sehari-hari kita, dan sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Dengan Pancasila semua elemen bangsa bisa bersatu. Pancasila sebagai simbol dan perekat kebhinekaan.

Dengan Pancasila terkandung sikap toleransi, saling menghormati dan saling gotong royong. Dapat dibayangkan jika Pancasila tidak ada ini dapat dikatakan cerai berai bangsa ini. Oleh sebab itu saatnya tata kehidupan dan masyarakat kembali menjadikan Pancasila sebagai keseharian hidup. Dengan hadirnya Pancasila mewakili semua komponen masyarakat bangsa ini yaitu ideology bangsa, nasionalisme, sosialisme, dan islamisme (Jhon Titaley : <https://www.berita.satu.com>) Ini menunjukkan bahwa salah satu ciri khas bangsa Indonesia adalah relegius. Dimana bangsa ini menempatkan agama pada kedudukan yang tinggi dan menjadi rujukan dalam bersikap dan berperilaku sejak ratusan tahun lalu. Ritual dan ibadah sesuai ajaran agama menjadi bagian integral kehidupan keseharian masyarakat. Demikian pula paham dan aliran pemikiran bangsa Indonesia banyak diwarnai dan dipengaruhi oleh agama. Tradisi dan budaya bangsa kita juga banyak di pengaruhi atau di muati ajaran agama. (Rofiqul Umam Ahmad: 2018)².

Perwujudan lainnya dari religiositas bangsa kita adalah adanya berbagai organisasi dan lembaga keagamaan sesuai agama yang hidup dan berkembang di Tanah Air. Organisasi dan lembaga keagamaan tersebut tumbuh subur mengiringi perjalanan hidup umatnya, membimbing umatnya sekaligus mengarahkan umatnya agar menjadi umat yang menjalankan ajaran agama secara utuh dan menyeluruh. Peranan ormas dan lembaga keagamaan dari berbagai agama dalam membekali umatnya dengan ajaran agama sangat besar karena menjadi tugas dan

tanggung jawab organisasi dan lembaga keagamaan yang dipimpin paripemuka dan tokoh agama untuk membimbing umatnya. (Rofiqul Umam Ahmad: 2018)³.

Berdasarkan paparan diatas maka, para pendiri negara sangat bijak Kita bersyukur sekali para pendiri negara sangat bijak dan arif ketika merumuskan prinsip-prinsip dasar bernegara untuk bangsa Indonesia yang sangat beragam latar belakang suku, agama, budaya, daerah, golongan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat prinsip dasar tersebut adalah kesepakatan nasional para pendiri negara ketika mendirikan negarayan menjadi acuan utama bagi seluruh umat beragama ketika menunaikan tugas sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara. (Rofiqul Umam Ahmad : 2018)⁴. Hal ini mempunyai makna bahwa keempat prinsip dasar tersebut milik semua umat beragama dan mengakomodasi semua visi, misi serta aspirasi umat beragama. Sesuai dan selaras serta mendukung keberadaan agama-agama dan kehidupan umat beragama. Makalah ini menawarkan pemikiran upaya yang harus dilakukan dalam membangun jejaring lintas agama dan budaya untuk menjaga kemajemukan dalam hal penguatan karakter bangsa. Sesuai dengan teori Lon L. Fuller melihat hukum sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu dimana hukum itu dapat di wujudkan dengan nilai-nilai yang di sebut “*prinsip legalitas*” (Lon L. Fuller : 1969)⁵. Ini mempunyai korelasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan karakter bangsa.

Untuk dapat mengungkapkan permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah pada makalah ini yakni: “Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam membangun jejaring lintas agama dan budaya untuk menjaga kemajemukan dalam penguatan karakter bangsa ?”

II. Tinjauan Teoritis

Pancasila adalah dasar negara, merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan nilai-nilai dasar yang merupakan gabungan dari nilai instrumental dan nilai praktis yang diatur dalam UUD 1945.

Pancasila sebagai sumber nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya (Kurotul Acni & Sudaryanto : 2005)⁶.

Pendidikan Karakter yaitu memfasilitasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji, menginternalisasi, dan mempersonalisasikan nilai; serta mengembangkan ketrampilan sosial dan akhlaq mulia dalam diri siswa, sehingga dapat mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari dalam berbagai konteks sosial budaya yang ber Bhineka sepanjang hayat (Nurul Zuriah: 2008)⁷.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah Program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah karsa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional ([https://www. websitependidikan.com](https://www.websitependidikan.com))⁸

Dalam makalah ini akan digunakan teori Lon L. Fuller, ada 8 nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum yang dinamakan delapan prinsip legalitas, yaitu :

- (1) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer.
- (2) Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.
- (3) Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- (4) Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- (5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
- (6) Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
- (7) Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah - ubah.
- (8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat. (Lon L. Fuller : 1969)⁹.

III. Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), yang di butuhkan untuk memahami, menangkap, dan menerima. Melalui pendekatan konsep, akan dipahami dan menjawab permasalahan Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam membangun jejaring lintas agama dan budaya untuk menjaga kemajemukan dalam penguatan karakter bangsa. Dalam ilmu hukum konsep-konsep dalam penguatan karakter bangsa dengan Analisa data yang dilakukan adalah analisa yang bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh dihimpun, disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis isinya dan akhirnya ditulis apa yang seharusnya dilakukan (*Prepektif*)

IV. Pembahasan

Realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multicultural atau majemuk. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda, Bahasa, adat istiadat, religi, dan lain-lainnya. Dengan kemajemukan masyarakat Indonesia mempunyai nilai positif dapat berpotensi membantu bangsa untuk maju dan berkembang bersama. Namun dari sisi lain dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak negatif yang terlihat terjadinya banyak konflik oleh struktur masyarakat yang unik sebab keaneka ragaman dari berbagai perbedaan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Akan tetapi jika berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis akan tercipta integrasi sosial yang baik.

Salah satu dampak positif yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia yaitu saling menghormati antar agama satu dengan agama yang lain. Dengan menunjukkan sikap kritis, toleransi, dan empati sosial merupakan salah satu upaya dalam menghadapi hubungan yang beraneka ragam perubahan kebudayaan di masyarakat. Oleh sebab itu sebagai dasar hukum dalam menunjukkan kerukunan masyarakat di Indonesia adalah dengan di keluarkannya Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di daerah sehubungan dengan telah terbentuknya wadah musyawarah antar umat beragama.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 mempunyai makna bahwa sesama umat beragama sudah sepantasnya saling menghormati dengan sama-sama memberikan ruang untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pemeluk agama yang taat dan mematuhi berbagai macam norma yaitu norma agama dan norma antar pribadi. Dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting : pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran Tuhan.

Berkaitan dengan paparan diatas maka salah satu masalah bagi generasi milenial saat ini adalah pendidikan karakter. Misalnya ada siswa yang menganiaya guru karena tidak terima diberi tindakan disiplin. Ada anak taman kanak-kanak tidak mau bergaul dengan temannya yang berbeda keyakinan. Bahkan, ada anak sekolah menyerang umat yang sedang ibadah di Gereja Santa Lidwina Yogyakarta. Hal-hal ini terjadi salah satunya adalah kurang rasa hormat, mudah bosan, mudah menyerah, egois. Kenyataan tentang akutnya problem moral inilah yang menempatkan makin pentingnya pendidikan karakter.

Pentingnya pendidikan karakter ini menjadikan salah satu dalam kebijakan nasional di bidang karakter pendidikan. Seluruh kegiatan belajar mengajar yang ada di Indonesia patut merujuk pada pelaksanaan pendidikan karakter. Dengan di berlakukannya pendidikan karakter maka ada kekuatan yang tidak kelihatan, namun bertumbuh melalui suatu proses dan ujian. Karakter yang baik menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan kata lain karakter adalah perilaku yang baik dari seseorang yang dapat di wujud nyatakan dalam lingkungan, agama dan budaya serta bangsa.

Melihat fenomena yang demikian maka penting bagi lembaga pendidikan berfungsi untuk membentuk pribadi yang tidak hanya berintelektual melainkan berkarakter baik dalam mendidik generasi milenial. Melalui pendidikan karakter maka pemerintah mengeluarkan dan mencanangkan pada tahun 2010 program “pendidikan budaya dan karakter bangsa” sebagai gerakan nasional. Ini mempunyai makna bahwa masalah utama bagi bangsa Indonesia adalah soal moral disinilah pentingnya pendidikan karakter bangsa sebaifai pilar pembangunan.

Pendidikan karakter bangsa ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan karakter bangsa secara konstitusional memiliki landasan yang sangat fundamental ialah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pendidikan karakter di mulai sejak dini agar lebih mudah diajarkan dan melekat di jiwa anak-anak itu hingga kelak mereka dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi yang menyatakan *education without character* (Zain Elmubarok: 2008)¹⁰. Pentingnya menanamkan pendidikan yang syarat dengan budi pekerti yang tinggi. Selain itu Lickona menyatakan tentang pengertian karakter yaitu:

Character consist of operative values, values in action. Character conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good and doing the good-habits of the mind, habits of the heart and habits of action (Lickona : 1991)¹¹

Dapat diartikan bahwa karakter terdiri atas nilai-nilai tindakan. Karakter dipahami mempunyai tiga komponen saling berhubungan yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan yang baik, menginginkan yang baik dan melakukan kebiasaan yang baik pula dari pikiran, kebiasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter mengangkat nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh latar belakang agama, budaya dan tradisi yang berbeda, tidak sekedar mengangkat teori semata namun juga aplikasinya di masyarakat. Pendidikan karakter dimaksudkan sekaligus sebagai pembentukan karakter. Pendidikan karakter itu sendiri merupakan sebuah proses panjang, yaitu proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, akhlak mulia yang berakar pada ajaran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang bermartabat, menjadi warga bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dengan demikian, siswa membutuhkan pendidikan karakter yang akan membentuk karakter positif.

Dalam pendidikan karakter harus membuat nilai-nilai dalam pendidikan Menurut Darmodiharjo (Kurotul Aeni & Sudaryanto, 2005)¹² nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. nilai adalah *“the results of judgments made by an individual or the society as a whole which determine the relative importance or worth of a thing, idea, practice or believe”*. (Barth : 1990)¹³. Dengan pengertian diatas dapat dipahami nilai merupakan hasil pertimbangan yang dibuat oleh seseorang atau masyarakat secara kelompok untuk menentukan penting atau berharganya suatu hal, gagasan, atau praktek.

Sebagai dasar filsafat negara maka korelasi Pancasila merupakan suatu nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada hakekatnya merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan yang tetap dan berangkai. Dengan demikian Pancasila mempunyai nilai-nilai universal yang wajib di amalkan dan diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang merupakan gabungan dari nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai instrumental pancasila tercermin dalam UUD 1945 maupun perundang-undangan lainnya. Nilai praktis tercermin dalam sikap warga negara Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dimana nilai-nilai ini mempunyai makna bisa disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Berdasarkan pernyataan diatas maka ada upaya untuk membangun jejaring lintas agama dan budaya untuk menjaga kemajemukan melalui penguatan karakter bangsa sebagaimana di kutip dari Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa kita mempunyai etika nasional yang dirumuskan dalam Pancasila. (Franz Magnis-Suseno : 2012)¹⁴ Etika dalam pancasila bukan hanya sebuah rumusan melainkan merupakan prasyarat agar bangsa Indonesia bisa maju bersama, damai, sejahtera dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Franz Magnis-Suseno merumuskan

etika Pancasila dalam lima pedoman yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Kelima pedoman tersebut adalah: 1) tak boleh ada tekanan, ancaman atau paksaan dalam hal agama, 2) dalam situasi apa pun kita bertindak secara beradab, 3) kita maju dan kita maju bersama 4) mari kita sukseskan demokrasi kita, dan 5) mari kita dahulukan yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi. Kelima pedoman tersebut muncul sebagai reaksi atas kondisi perilaku masyarakat yang sangat mengkhawatirkan seperti saat ini. Pancasila sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia di era globalisasi ini semakin diabaikan bahkan ditinggalkan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk merevitalisasi atau membangun kembali karakter bangsa yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini dilakukan merupakan suatu upaya untuk merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan untuk meminimalkan agar tingkat degradasi moral dapat menurun.

Refleksi nilai Pancasila dalam kemajemukan masyarakat di Indonesia dalam hal Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan (Penguatan Karakter Bangsa) dapat ditunjukkan dalam tata kehidupan yang melahirkan rasa saling menghargai dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, ini menunjukkan kemajemukan masyarakat di Indonesia kaya akan budaya. Antar umat beragama dapat saling berbagi informasi tentang adat, agama yang satu dengan yang lainnya. Menunjukkan tentang keanekaragaman adat istiadat Indonesia.

Antar umat beragama wajib saling menghormati, jika terjadi kesalahpahaman antar umat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mencapai jalan damai. Indonesia merupakan negara besar yang dibangun diatas pondasi kemajemukan. Terciptanya masyarakat majemuk dan multi kultural yang meliputi Ras, Suku, Bahasa, Budaya, Agama maupun golongan yang sangat beragam. Oleh sebab itu upaya untuk melakukan penataan kelembagaan formal terstruktur sebagai pengawas dan pengembangan nilai-nilai pancasila secara formal yaitu memberlakukan kembali ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978 tentang Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan adanya penyamaan interpretasi pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada warga masyarakat.

Penulisan makalah ini memberikan suatu konsep cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila untuk Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan (Penguatan Karakter Bangsa):

Pertama, Menghargai antar umat beragama melalui saling menghormati antara agama satu dengan agama lainnya. Contoh salah satunya Hari Raya Idul Fitri tidak hanya umat muslim yang merayakan, tetapi semua warga negara Indonesia juga ikut merayakannya sebagai bentuk toleransi dan menghormati satu sama lain begitu juga sebaliknya umat agama lainnya.

Kedua, Antar umat beragama harus saling menghormati jika terjadi kesalahpahaman antar umat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mencapai jalan damai. Dengan demikian turut melestarikan adat istiadat / budaya di Indonesia.

Ketiga, Cara merawat kemajemukan bangsa: a) Menghormati Perbedaan; b) Memelihara Hak dan Kewajiban umat Beragama; c) NKRI lebih utama dari apaun; d) Genggam Erat Bhineka Tunggal Ika; e) Daya paksa pemerintah; f) Kesadaran masyarakat; g) Hilangkan Semangat Sekterian; h) Menanamkan Nilai-nilai dalam pendidikan karakter; j) Meningkatkan Intensitas pemberian materi pelajaran pendidikan Pancasila seperti Pendidikan Moral Pancasila pada tataran Teori maupun praktek kepada para siswa/ mahasiswa pada semua jenjang pendidikan; k) Penyamaan Interpretasi pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Pada dasarnya penguatan karakter bangsa dalam kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan keseluruhan proses pendidikan yang dialami oleh warga masyarakat Indonesia sebagai pengalaman pembentukan kepribadian melalui memahami dan mengalami sendiri nilai-nilai keutamaan moral, nilai-nilai ideal agama, dan nilai-nilai moral. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Keterkaitan dengan teori Lon L. Fuller dari prespektif hukum dan masyarakat mempunyai tujuan tertentu adalah pada usaha yang mengandung nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Apabila gagal untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai sebagai mana dikemukakan oleh Fuller yaitu :

- (1) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer.
- (2) Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.
- (3) Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- (4) Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- (5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
- (6) Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
- (7) Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah - ubah.
- (8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat. (Lon L. Fuller : 1969)

Maka kegagalan ini bukan saja menyebabkan timbulnya sinitim hukum yang buruk, akan tetapi hukum yang demikian adalah sama sekali tidak dapat di sebut hukum, oleh sebab itu hukum tersebut wajib mengandung dalam diri nya nilai-nilai sebagaimana yang disebut prinsip legalitas oleh Fuller. Nilai-nilai tersebut dapat berkembang menjadi hubungan antar hukum dan moral. Refleksi penguatan karakter bangsa tidak semudah memberi nasehat dan instruksi namun memerlukan kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan.

Dengan keutamaan moral, nilai-nilai ideal agama dan nilai moral menunjukkan bahwa pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan dan memberlakukan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) diharapkan mampu membentuk karakter pribadi-pribadi penerus bangsa.

V. Kesimpulan

Upaya yang harus dilakukan dalam membangun jejaring lintas agama dan budaya untuk menjaga kemajemukan dalam penguatan karakter bangsa. Adalah Merevitalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukan untuk meminimalkan agar tingkat degradasi moral dapat menurun.

Perlu adanya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Ideologi Pancasila. Dengan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan integritas Nasional akan tetap terjaga. Memberlakukan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) diharapkan mampu membentuk karakter pribadi-pribadi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rotiqul Umam (2018) Peran Ormas / Lembaga Keagamaan dalam mengawal NKRI dan memperkuat kerukunan umat beragama, 70 tahun Winata Sairin Jakarta. Gunung Mulya
- Fuller, Lon L. (1969) The Morality of Law New York, The New American Library
- Zuriah Nurul (2008) Pendidikan moral dan budi pekerti dalam perspektif perubahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Elmubarok Zain (2008) Membumikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta.
- Lickona (1991) Educating for character. New York: A Bantam Books.
- Barth (1990) Methods of Instruction in Social Studies Education: Third Edition. New York: University Press of America

Jurnal

- Kurotul Acni & Sudaryanto 2005 Proses pendidikan budi pekerti di Taman Muda Majelis Ibu Pawaiyatan Tamansiswa Yogyakarta. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Nomor 1, Tahun VII

Internet

- Jhon Titaley, Euforia Reformasi membuat Pancasila terlupakan <https://www.berita.satu.com>
- Penguatan Pendidikan Karakter <https://www.websitependidikan.com>

Makalah

- Suseno, Franz Magnis- (2012) Etika Bangsa Berbudaya di Abad ke 21: Keharusan kalau Indonesia mau maju”, makalah pada Seminar Nasional Membangun Karakter Bangsa melalui Pemantapan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang 30 Mei 2012